

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan laporan keuangan pemerintah tidak terlepas dari perkembangan kemajuan suatu negara terutama pengelolaan keuangan dan kondisi politik. Semakin maju suatu negara dan menganut paham demokrasi, maka laporan keuangan negara tersebut hampir dipastikan baik. Demikian juga sebaliknya, jika negara tersebut masih tertinggal, maka laporan keuangan negara tersebut juga tidak/kurang baik. Kondisi di atas dapat dipahami, karena negara yang baik dan menganut paham demokrasi pasti melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa prinsip *good governance* antara lain akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas, mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat termasuk pelaksanaan anggarannya (APBN/APBD). Demikian juga, prinsip transparansi, pemerintah harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan mengakses informasi tersebut. Suatu negara dikatakan menerapkan *good governance* terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi apabila negara tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Endaryati, 2021).

Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara atau Lembaga (Fadhilatunnisa & Farida, 2020).

Pesatnya perkembangan teknologi menuntut adanya transformasi penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas sehari-sehari. Hal ini menjadikan

adanya memungkinkan semakin mudah dan cepatnya aktivitas khususnya bagi organisasi, perusahaan maupun lembaga (Indah *et al.*, 2021). Selaras dengan perkembangan teknologi informasi, sistem informasi juga tumbuh pada seluruh lini kehidupan manusia. Sistem informasi dapat membantu individu atau organisasi dalam mengelola informasi. Sebagaimana sektor privat telah mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, sektor publik dalam hal ini Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sistem informasi dalam mewujudkan *good government governance* (Anwar & Hadi, 2022). Salah satu dari rangkaian proses reformasi informasi tersebut, yaitu dengan diimplementasikannya SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sejak tahun 2014 dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) mulai tahun 2016.

Pada dasarnya, SPAN adalah bagian dari *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang terintegrasi, sehingga pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS. IFMIS merupakan paket pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. IFMIS terdiri dari beberapa unsur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara dimulai dengan adanya transaksi keuangan di lingkup satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga. Dalam lingkup satuan kerja tersebut, implementasi IFMIS diwujudkan dalam bentuk beberapa penyempurnaan proses bisnis pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Perubahan yang akan dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi pada satuan kerja (saat ini jumlahnya sangat banyak dengan *data base* yang terpisah-pisah) menjadi satu aplikasi dengan *data base* yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan pengulangan *entry* data. Penggabungan aplikasi dan *database* pada tingkat satuan kerja akan diwujudkan dalam suatu sistem aplikasi di lingkup Satuan kerja yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI yang akan dikembangkan meliputi penggabungan fungsi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan anggaran, akan terdapat beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data *supplier*, manajemen data kontrak, Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. Untuk memfasilitasi pengiriman data dari aplikasi SAKTI yang ada di lingkup satuan kerja ke aplikasi SPAN yang ada pada Kementerian Keuangan, juga dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi Portal SPAN dan SPAN SMS.

SAKTI digunakan oleh satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas infrastruktur yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas infrastruktur yang sangat minim. SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang akan digunakan oleh mereka yang memiliki fungsi perbendaharaan di satuan kerja, seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda tangan SPM, serta Bendahara dengan didasarkan pada peran dan tupoksi masing-masing, sehingga akses terhadap aplikasi SAKTI akan diberikan untuk mereka yang menjalankan fungsi Perbendaharaan yang berbeda-beda tersebut.

Dalam bidang pertanggungjawaban, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. SAKTI memfasilitasi kewajiban penyusunan laporan keuangan di tingkat satuan kerja sebagai entitas akuntansi, yaitu unit pemerintah pengguna anggaran atau pengguna barang yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Mulai tahun 2015 pemerintah pusat harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangannya.

Pada awalnya, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015 direncanakan menggunakan aplikasi SAKTI. Namun karena aplikasi SAKTI belum siap digunakan untuk semua kementerian negara/lembaga, maka laporan keuangan berbasis akrual tahun 2015 disusun menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAKTI, SAKTI mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan *piloting* 12 Satker di Kemenkeu dan Satker SPAN. Berikutnya tahun 2016 dilakukan *piloting* di Ditjen Perbendaharaan (seluruh KPPN). Tahun 2017 *piloting* di DJPBN dan dan K/L pusat yang tidak ada satker vertikalnya. Tahun 2018 SAKTI diimplementasikan di seluruh Eselon I Kementerian Keuangan kecuali Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi keseluruhan fungsi SDM dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan dan juga karena luasnya tanggung jawab fungsi ini yang meliputi seluruh perusahaan. Fungsi SDM dapat ditingkatkan jika ditunjang oleh suatu pengendalian intern yang baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan. sumber daya manusia merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif. Kompetensi sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Kompetensi juga merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Pengendalian internal dapat menjadi faktor penting agar suatu sistem dapat berjalan dengan efektif. Hal ini karena pengendalian internal dapat memenuhi fungsi sistem informasi akuntansi menyangkut adanya pengendalian yang memadai untuk pengamanan aset data organisasi. Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal memberikan dampak yang positif terhadap organisasi atau

instansi, sebaliknya organisasi tanpa pengendalian internal tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien (Aisyah, 2017).

Kemudian, Pengendalian internal yang digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik termuat dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (BPK, 2008) yang terdiri atas lima unsur, yaitu: (1) lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan perilaku, kepedulian, dan tindakan-tindakan dari pejabat pengelola, dewan pengawas, dan staf dalam mengembangkan dan menerapkan pengendalian intern dan tata kelola yang baik, (2) identifikasi risiko dan analisis resiko dilakukan untuk menjaga, menerapkan, atau meninjau pengendalian internal di organisasi, (3) aktivitas pengendalian dikembangkan dan diterapkan pada seluruh proses operasional dan keuangan, termasuk di dalamnya kegiatan review kinerja, pengendalian fisik atas aset, serta pengendalian umum dan aplikasi pada sistem teknologi, (4) diperlukan informasi yang dapat diakses dan adanya saluran komunikasi dua arah yang berjalan secara efektif dan (5) diperlukan kegiatan penilaian secara berkesinambungan terhadap efektivitas atas rancangan dan kegiatan sistem pengendalian internal dengan memberikan masukan berupa tindakan perbaikan yang ditujukan untuk membantu dewan pengawas, pejabat pengelola, dan manajemen tingkat menengah untuk memastikan adanya pemasangan dan penerapan pengendalian yang tepat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu dengan penerapan SAKTI, kompetensi SDM dan pengendalian internal. Diantaranya ad, penelitian yang dilakukan (Corry & Siti, 2024) yang menunjukkan bahwa penerapan SAKTI terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan model HOT-Fit yaitu sistem telah berjalan dengan cukup efektif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan ( I Gusti & Luh, 2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan.

Selanjutnya, penelitian mengenai pengaruh implementasi SAKTI terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh (Miftahul, 2022) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, yaitu *system quality* dan *information quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap user

satisfaction serta user satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap net benefit. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Rina et al., 2024) menyimpulkan bahwa Implementasi SAKTI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tinggi rendahnya implementasi SAKTI tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya adalah penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh (Muhammad *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian dari (Ucik et al., 2020) menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai yang tidak berkompeten atau berkompeten tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan standart yang dibuat oleh pemerintah dan menggunakan software yang sama.

Selanjutnya adalah penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan menggunakan Fintech yang dilakukan oleh (Neli *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Sedangkan penelitian dari (Sahala *et al.*, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dari lembaga.

Berdasarkan Permentan 13 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian bertransformasi menjadi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disingkat menjadi BBPSIP. BBPSIP memiliki tugas pokok melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. BBPSIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki satuan kerja yang tersebar diseluruh di 34 provinsi yaitu Balai Penerapan Standar Instrume Pertanian yang selanjutnya disingkat BPSIP. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BBPSIP dan BPSIP di 34 Provinsi memiliki tugas pada subbagian tata usaha yaitu pengelolaan anggaran. Pengelola anggaran di lingkup BBPSIP terdiri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan

Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan dan staf pengelola keuangan yang jumlahnya disesuaikan dengan pagu anggaran. Setiap pejabat pengelola keuangan baik KPA, PPSPM, PPK, Bendahara dan Penyusun Laporan Keuangan memiliki akun pada aplikasi SAKTI sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Pada saat aplikasi SAKTI akan diterapkan pada setiap satuan kerja maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara disetiap provinsi melakukan sosialisasi Aplikasi SAKTI.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pada satuan kerja lingkup BBPSIP masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan catatan atas Laporan keuangan semester I tahun 2022 Badan Litbang Pertanian selaku unit eselon 1 dari BBPSIP Masih terdapat 7 (tujuh) Satker yang masih terkendala status K3 merah dalam MONSAKTI terkait adanya Anomali Data Aset, menurut SE DJPB Nomor S-30/PB/PB.6/2022 Tanggal 25 Juli 2022 terkait Penyelesaian data asset tetap/ asset lainnya anomaly yang berdampak pada pergeseran saldo laporan keuangan tahun 2021 Audited agar ditindaklanjuti setelah dilakukannya migrasi data ke SAKTI dan dilakukan normalisasi di tahun berjalan antara lain :

**Tabel 1.1**  
**Anomali Data Aset Semester I Tahun 2022**

No	Deskripsi	Jenis Aset
1	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau	BMN
2	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	KDP
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	BMN
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	BMN
5	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat	BMN
6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	KDP
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	BMN

Sumber: Laporan Keuangan Semester I 2022 Badan Litbang Pertanian

Pada laporan keuangan tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat Pagu belanja minus pada beberapa satker Badan Litbang Pertanian yang sudah dalam proses revisi antara lain :

**Tabel 1.2**  
**Data Pagu Minus Periode Semester I Tahun 2022**

No	Nama Satker	Akun	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
1	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura	511125	38.317.000,00	39.858.188,0	- 1.541.188,00
2	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi	511125	41.454.000,00	54.357.039,00	- 12.903.039,00
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan	511126	51.741.000,00	52.142.400,00	- 401.400,00
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat	511125	4.498.000,00	7.461.642,00	- 2.963.642,00
5	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat	511138	113.100.000,00	135.390.000,00	- 22.290.000,00
6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi	511124	190.400.000,00	206.990.000,00	- 16.590.000,00
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	511125	77.417.000,00	79.408.652,00	- 1.991.652,00
8	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim	511125	8.594.000,00	12.506.412,00	- 3.912.412,00
9	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku	511125	11.290.000,00	11.685.996,00	- 395.996,00
	<b>TOTAL</b>				<b>- 61.475.141</b>

Sumber: Laporan Keuangan Semester I 2022 Badan Litbang Pertanian

Sedangkan berdasarkan laporan keuangan semester I Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, terdapat permasalahan berupa Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB pada satker Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdapat pada satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau senilai Rp1.046.175,00 merupakan pembelian belanja modal alat laboratorium dibawah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin yang di input dalam modul Aset Tetap. Terdapat Saldo Akun Tidak Normal pada 2 satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari

**Tabet 1.3**  
**Data Saldo Tidak Normal Periode Semester I Tahun 2022**

NO	KODE	NAMA SATKER	AKUN	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO NORMAL
1	567563	BPSIP Kalimantan Barat	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-	340.908	D
2	567318	BPSIP Jawa Tengah	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	-	1.880.000	D

Sumber: Laporan Keuangan Semester I 2022 Badan Litbang Pertanian

Sampai dengan periode tutup buku permanen pada tanggal 16 Oktober 2023, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian masih mempunyai nilai Pagu Minus yang terdapat 15 satker terkait cutoff Akun Gaji pada saat transformasi kode

kegiatan 1809 (Balitbangtan) menjadi 6918 (BSIP) yang masih dalam proses revisi antara lain:

**Tabel 1.4**  
**Data Pagu Minus Periode Oktober Tahun 2023**

NO	NAMA	KEG	OUTPUT	AKUN	REVISI PAGU	REALISASI	SISA PAGU
1	SATKER BPSI	6918	EBA	511124	172.040.000	179.826.000	- 7.786.000
2	BPSIP Bengkulu	1809	EBA	511122	22.885.000	22.989.466	- 104.466
3	LPSITANEKA Umbi	1809	EBA	511125	30.000	258.765	- 228.765
4	SET BSIP	1809	EBA	511122	47.212.000	47.246.158	- 34.158
5	BPSIT Jeruk Dan Buah	1809	EBA	511125	332.000	1.980.880	- 1.648.880
6	BPSIP Sulawesi Tengah	1809	EBA	511126	37.007.000	46.276.380	- 9.269.380
7	PSI Perkebunan	1809	EBA	511122	18.757.000	18.796.866	- 39.866
8	SET BSIP	1809	EBA	511111	2.116.430.000	2.118.972.800	- 2.542.800
9	BPSIP Riau	1809	EBA	511126	42.221.000	52.794.180	- 10.573.180
10	BPSIP Sulawesi Selatan	1809	EBA	511111	1.792.150.000	1.792.150.100	- 100
11	BPSIP Kalimantan Barat	1809	EBA	511125	949.000	3.966.329	- 3.017.329
12	BPSIP Maluku	1809	EBA	511125	315.000	1.402.508	- 1.087.508
13	SET BSIP	1809	EBA	511124	191.505.000	191.925.000	- 420.000
14	BPSIP Lampung	1809	EBA	511126	46.495.000	58.080.840	- 11.585.840
15	BPSIP Kepulauan Riau	6918	EBA	511124	29.870.000	30.240.000	- 370.000
16	BBPSI Veteriner	1809	EBA	511126	60.326.000	75.244.380	- 14.918.380
17	SET BSIP	1809	EBA	511125	4.884.000	12.118.911	- 7.234.911
18	BPSIP Riau	1809	EBA	511125	3.335.000	7.675.430	- 4.340.430
19	SET BSIP	1809	EBA	511126	99.795.000	124.634.820	- 24.839.820
20	BPSIP Kalimantan Barat	1809	EBA	511119	13.000	13.043	- 43
21	BPSIP Sulawesi Tengah	6918	EBA	511123	4.860.000	7.020.000	- 2.160.000
22	BPSIP Lampung	1809	EBA	511125	1.275.000	3.701.413	- 2.426.413
23	BPSIP Bengkulu	1809	EBA	511111	1.028.268.000	1.028.268.900	- 900
24	BBPSI Mekanisasi Pertanian	6918	EBA	511124	299.201.000	330.445.000	- 31.244.000
25	PSI Perkebunan	1809	EBA	511125	1.841.000	4.725.711	- 2.884.711
26	BPSIP Maluku	1809	EBA	511126	32.600.000	40.627.620	- 8.027.620
27	PSI Perkebunan	1809	EBA	511151	27.829.000	27.920.000	- 91.000
28	PSI Perkebunan	1809	EBA	511124	77.720.000	78.800.000	- 1.080.000
29	SET BSIP	1809	EBA	511121	153.082.000	153.381.130	- 299.130
30	PSI Perkebunan	1809	EBA	511126	38.600.000	48.159.300	- 9.559.300
31	BPSIP Kalimantan Barat	1809	EBA	511126	47.652.000	47.652.360	- 360
							- 157.815.290

Sumber: Laporan Keuangan Semester I 2022 Badan Litbang Pertanian

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2022 dan 2023 tersebut, terdapat permasalahan pada Laporan keuangan yang disusun menggunakan aplikasi SAKTI sehingga perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pengaruh implementasi SAKTI terhadap laporan keuangan.

Selain penggunaan aplikasi sistem informasi, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu bagi seseorang untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Pada situasi kolektif dalam organisasi,

kompetensi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi (BPKP, 2015).

Kompetensi SDM yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Setyowati d.k.k., 2016). Masalah yang sering muncul adalah ketidaksiapan SDM dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI yang relatif masih baru serta latar belakang pendidikan yang beragam ada satuan kerja dimana tidak semua pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan dibidang keuangan. Adanya SAKTI, pengguna dituntut lebih memahami dan teliti dalam menginput data dan tidak menunda pekerjaan serta dapat bersinergi dengan pengguna lainnya. Pengelola keuangan di BBPSIP terdiri dari berbagai bidang ilmu, yang sebagian besar didominasi bidang pertanian.

Penggunaan sistem informasi dan kompetensi SDM merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Nurillah, 2014). Namun masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal digunakan untuk melindungi aset, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga seluruh informasi dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan (Wadiyo, 2019). Pengendalian internal merupakan salah satu aspek penilaian BPK dalam menerbitkan opini. BPK menemukan 14 kelemahan pengendalian internal pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023.

Jumlah kelemahan pengendalian internal pada LKPP tahun 2021 dan 2023 relatif lebih banyak karena opini yang diraih adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perkembangan kelemahan pengendalian internal LKPP dari periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel 1.6.

**Tabel 1.6**  
**Perkembangan Kelemahan Pengendalian Internal**  
**LKPP Tahun 2021 – 2023**

Periode LKPP	Opini	Jumlah Kelemahan
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	9
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	16
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI (2021, 2022, 2023), diakses tanggal 1 Juli 2024,

[https://www.bpk.go.id/laporan\\_hasil\\_pemeriksaan#](https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan#)

Meskipun opini BPK RI terhadap LKPP sejak tahun 2021-2023 adalah wajar tanpa pengecualian, namun pada tahun 2023 Kementerian Pertanian memperoleh opini wajar dengan pengecualian, BBPSIP sebagai salah satu unit kerja eselon 2 pada Kementerian Pertanian perlu melakukan perbaikan dalam aktivitas pengendalian internal.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai minat menggunakan aplikasi *Fintech Payment*, dengan judul “**Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi SDM Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BBPSIP Bogor**”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun beberapa masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Secara teoritis, diharapkan agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi berupa ilmu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang baik.
  - b) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan landasan teoritis bagi peneliti baru agar dapat membantu dalam meneliti dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tema penelitian.
- 2) Manfaat Praktis
  - a) Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang sama.
  - b) Bagi instansi dalam pembuatan laporan keuangan, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana informasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), kompetensi SDM dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang jelas dan terperinci untuk mempermudah pembahasan materi dari penelitian ini. Peneliti akan menjabarkan dalam lima bab yang diuraikan antara lain.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan landasan dalam pembahasan suatu permasalahan.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi data dan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Sejarah instansi, struktur organisasi dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan secara singkat dan tepat dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

